

ANALISIS PERAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI PEKERJA KELAS BAWAH MELALUI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: PERSPEKTIF KEYNESIAN TERHADAP PEREDARAN UANG DAERAH

Zahra Sugeng Pratiwi ¹, Chairil Anwar ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Zahrapratiwi3105@gmail.com , Chairilanwar.akn@unusida.ac.id

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong perkembangan ekonomi lokal. Program ini dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai unit operasional dalam menyediakan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SPPG dalam memberdayakan ekonomi pekerja berpenghasilan rendah, mengenali potensi dan tantangan dalam pelaksanaan program, serta menjelaskan hubungan antara MBG dan peredaran uang di daerah berdasarkan sudut pandang Keynesian. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan SPPG membuka peluang kerja baru bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat rantai ekonomi lokal dengan memanfaatkan bahan baku dari pelaku usaha setempat. Dari sudut pandang Keynesian, pengeluaran pemerintah melalui MBG berpotensi menciptakan efek pengganda yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mempercepat sirkulasi uang di tingkat lokal. Namun, ada sejumlah tantangan seperti pengawasan kualitas, keberlanjutan pembiayaan, dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola program tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi peran SPPG harus didukung oleh tata kelola yang baik dan kolaborasi dari berbagai pihak agar manfaat ekonomi dan sosial dari program ini dapat berlanjut dengan baik. (Ariyanto & Saharuddin, 2026)

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, SPPG, pemberdayaan ekonomi

Article history

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026
Plagiarism checker no
234.8576

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, serta kelompok yang rentan. Inisiatif ini dijalankan lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bertugas dalam mengedarkan makanan bergizi dengan cara yang terencana kepada target masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya terkait aspek kesehatan publik, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama bagi pekerja lokal yang terlibat dalam rantai produksi dan penyebaran makanan. (Ariyanto & Saharuddin, 2026)

Dari sisi empiris, pelaksanaan SPG menawarkan peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang pengolahan makanan, pengiriman logistik, penyediaan bahan baku, serta pengawasan mutu gizi. Menurut simulasi kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan Indonesia pada tahun 2025, program tersebut diperkirakan akan menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan baru di berbagai wilayah jika dilaksanakan secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat intervensi sosial dapat menjadi alat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. (Hanasi et al., 2026)

Dalam konteks ekonomi makro, fenomena ini relevan untuk diteliti dengan menggunakan teori Keynesian yang menekankan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan keseluruhan, menciptakan peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. PPNG sebagai bentuk pengeluaran sosial yang produktif memiliki potensi untuk memberikan efek pengganda yang memperkuat aliran ekonomi di tingkat daerah. (Ariyanto & Saharuddin, 2026)

Rumusan permasalahan dalam studi ini mencakup. Apa saja keuntungan MBG bagi kesejahteraan keluarga dari kalangan pekerja berpenghasilan rendah. Apa saja kemungkinan dan hambatan dalam penerapan MBG/SPPG untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bagaimana keterkaitan antara MBG dengan sirkulasi uang di wilayah tersebut. (Riawan et al., 2026)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran SPPG dalam memajukan ekonomi para pekerja rendah melalui program MBG dengan pendekatan Keynesian terhadap sirkulasi uang di daerah tersebut. (Ariyanto & Saharuddin, 2026)

Kajian Pustaka

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan penting pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Dalam penerapannya, MBG dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas memastikan pengadaan bahan pangan, pembuatan makanan, penyaluran, serta pengawasan kualitas makanan kepada orang yang berhak menerima. Model pelaksanaan ini tidak hanya mencakup penuisian kebutuhan gizi, tetapi juga mencampurkan kemungkinan ekonomi lokal dengan melibatkan para pengusaha UKM, petani, peternak, serta tenaga kerja yang ada di sekitar area operasional SPPG. (Riawan et al., 2026)

Adanya SPPG menjadi hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan MBG karena SPPG berfungsi sebagai tempat produksi dan penyebaran makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang dituju. Penelitian itu mengatakan bahwa kemampuan SPPG berjalan baik bergantung pada keadaan tenaga manusia, kualitas bahan makanan, sistem penyampaian makanan, serta kerja sama antar lembaga. Selain itu, pelaksanaan MBG melalui SPPG memberikan kesempatan baru bagi masyarakat sekitar dalam bidang ekonomi, dengan adanya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kebutuhan akan bahan pangan lokal. (Aziizah et al., 2026)

Penelitian oleh Prasetyo dan tim tahun 2026 juga menunjukkan bahwa kerja sama antara sekolah dan SPPG berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan penerapan MBG. Sistem koordinasi yang baik dapat membuat distribusi makanan lebih efisien, memperkuat pengelolaan program, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kelanjutan program tersebut. Pendekatan kerja sama tersebut menunjukkan bahwa SPPG bukan hanya menjadi tempat pelayanan gizi, tetapi juga berperan dalam mendorong perkembangan sosial dan ekonomi di tingkat daerah. (Ariyanto & Saharuddin, 2026)

Peredaran Uang Daerah dalam Perspektif Keynesian

Peredaran uang daerah adalah proses mengalirnya uang melalui kegiatan membuat barang, menyebarkan barang, dan menggunakan barang yang dilakukan oleh warga, pengusaha, serta pemerintah dalam sebuah daerah. Tingginya peredaran uang mencerminkan adanya kegiatan ekonomi yang cukup aktif dan bisa membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Program MBG, uang yang dimiliki pemerintah digunakan untuk membayar pekerja SPPG, membeli bahan makanan dari petani setempat, serta memakai jasa pengiriman dan usaha kecil menengah di sekitar tempat pelaksanaan program tersebut. Uang yang diterima oleh masyarakat kemudian digunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga, sehingga meningkatkan belanja dan menciptakan transaksi baru dalam perekonomian. (Aziizah et al., 2026)

Penelitian oleh Aziizah dan tim tahun 2026 menunjukkan bahwa menggabungkan usaha mikro kecil menengah dengan sistem pengelolaan pasar lokal bisa memperkuat proses distribusi barang makanan lokal dan meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Kolaborasi itu tidak hanya membuat omzet usaha kecil meningkat, tetapi juga membantu makanan tersedia lebih aman dan memberi peluang kerja lebih banyak kepada masyarakat sekitar. Semakin banyak produk lokal yang digunakan dalam Program MBG, semakin banyak pula uang yang berputar di dalam daerah, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. (Prasetyo et al., 2026)

Pelaksanaan Program MBG juga mendorong terbentuknya hubungan ekonomi yang berkelanjutan antara pemerintah, usaha kecil menengah, petani, dan masyarakat, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang lebih produktif. Ini sesuai dengan konsep Keynesian yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah bisa jadi penggerak utama kegiatan ekonomi ketika masyarakat mendapat tambahan penghasilan, lalu penghasilan itu digunakan lagi untuk membeli barang dan jasa. (Prasetyo et al., 2026)

Metode



Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, sebuah metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan lebih mendalam melalui pengumpulan data yang meliputi narasi, pengalaman, dan interpretasi dari partisipan yang terlibat dalam penelitian ini (Creswell, 2018). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengeksplorasi peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam meningkatkan ekonomi pekerja dari lapisan bawah melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga diperlukan pemahaman yang kontekstual mengenai realitas sosial-ekonomi masyarakat yang berpartisipasi. (Mursalin et al., 2026)

Studi ini termasuk dalam kategori kasus (case study), yang berarti penelitian ini membahas fenomena tertentu dalam konteks spesifik. Penelitian difokuskan pada implementasi MBG melalui SPPG di tingkat lokal dengan menilai pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga para pekerja kelas bawah, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program, termasuk dampaknya terhadap peredaran uang di wilayah tersebut. (Basit & Ramadani, 2025)

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan individu seperti pekerja SPPG, pengelola program, dan penyedia bahan pangan lokal, serta melalui observasi lapangan terhadap selama kegiatan distribusi makanan bergizi dan analisis dokumentasi dari laporan pemerintah, data Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal akademik, dan dokumen kebijakan terkait Program MBG. (Mursalin et al., 2026)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, dimana hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan untuk mendapatkan konsistensi informasi secara objektif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan wawasan analitis mengenai peran SPPG yang tidak hanya sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai katalis pemberdayaan ekonomi lokal dengan sudut pandang teori Keynesian melalui peningkatan permintaan agregat serta efek pengganda pada perekonomian daerah. (Riawan et al., 2026)

Data dikumpulkan melalui dialog mendalam dengan karyawan SPPG, pengelola dapur, dan pemasok bahan pangan setempat, Pengamatan aktif terhadap kegiatan distribusi makanan. Analisis dokumen dari laporan pemerintah, data BPS, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan publik. (Riawan et al., 2026)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Manfaat Program MBG bagi Pekerja Kelas Bawah dan Keluarganya

Adanya SPPG memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dengan menciptakan peluang kerja. Operasional SPPG membutuhkan orang-orang untuk melakukan tugas seperti memasak, membungkus makanan, mendistribusikan makanan, mengurus administrasi, membersihkan tempat, dan mengawasi kualitas makanan. Kebutuhan akan tenaga kerja ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan resmi. (Basit & Ramadani, 2025)

Peningkatan peluang kerja berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga. Pendapatan yang diterima pekerja SPPG digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Oleh karena itu, program ini tidak hanya memberi manfaat bagi orang yang menerima makanan bergizi, tetapi juga kepada keluarga para pekerja yang terlibat dalam menjalankan operasionalnya. Selain meningkatkan penghasilan, adanya pekerjaan yang cukup stabil memberikan rasa tenang dalam hal ekonomi bagi keluarga yang memiliki pekerjaan tersebut. Stabilitas penghasilan membuat keluarga bisa merencanakan uang lebih baik dibandingkan kalau hanya bergantung pada pekerjaan non-formal yang tidak pasti. (Basit & Ramadani, 2025)

Dari segi sosial, partisipasi masyarakat dalam SPPG juga membantu meningkatkan kemampuan kerja mereka. Pekerja mendapatkan pengalaman dalam mengelola makanan, mengelola operasi sehari-hari, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Secara tidak langsung, program MBG juga memberikan manfaat bagi anak-anak pekerja. Dengan meningkatnya penghasilan keluarga, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan semakin baik, sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupan bagi generasi yang akan datang. (Aziizah et al., 2026)

Potensi dan Tantangan Program MBG melalui SPPG

Potensi utama Program MBG adalah kemampuannya dalam menciptakan dampak ekonomi yang luas di tingkat lokal. SPPG membutuhkan banyak bahan makanan sehingga menciptakan permintaan tetap bagi petani, peternak, nelayan, dan pengusaha UMKM lokal. Permintaan yang semakin tinggi dapat mendorong peningkatan produksi di daerah tersebut. Petani mendapat pasar yang lebih pasti untuk hasil panen mereka, sementara pengusaha kecil mendapat kesempatan untuk meningkatkan omzetnya. Kondisi ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada komunitas setempat. (Hanasi et al., 2026)

Program MBG memiliki kemungkinan untuk mengurangi perbedaan ekonomi antar daerah. Kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah sekarang dapat mendapatkan pekerjaan serta mengakses manfaat ekonomi yang sebelumnya lebih sering dinikmati oleh masyarakat dengan pendapatan menengah hingga tinggi. Namun demikian, implementasi program menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah memastikan bahwa makanan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Membuat makanan dalam jumlah banyak membutuhkan prosedur kerja yang sangat ketat agar kualitas makanan tetap baik. (Hanasi et al., 2026)

Tantangan kedua berkaitan dengan keberlanjutan pendanaan. Program MBG memerlukan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan pengelolaan uang secara efektif agar program tersebut dapat berjalan terus menerus. Tantangan ketiga adalah kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan SPPG membutuhkan pekerja yang memiliki kemampuan di bidang gizi, kebersihan, pengadaan barang, dan urusan administrasi. Keterbatasan kapasitas SDM dapat memengaruhi efektivitas program. Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang terlibat juga memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut. (Ariyanto & Saharuddin, 2026)

Kaitan MBG dengan Peredaran Uang di Daerah

Dari sudut pandang Keynesian, MBG adalah bentuk pengeluaran pemerintah yang bisa meningkatkan permintaan agregat daerah. Dana yang diberikan pemerintah dialirkan ke SPPG untuk membeli bahan-bahan dasar, membayar upah pekerja, serta menutupi biaya operasional. Dana tersebut selanjutnya diterima oleh keluarga dan pengusaha lokal sebagai sumber pendapatan. (Aziizah et al., 2026)

Pendapatan yang diterima pekerja dan pemasok tidak berhenti hanya pada satu transaksi saja. Mereka menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang yang diperlukan setiap hari, membayar biaya sekolah anak, atau melakukan kegiatan berbisnis lainnya. Proses ini menyebabkan efek berlipat ganda, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran awal yang dilakukan pemerintah. (Mursalin et al., 2026)

Secara nyata, terlibatnya ribuan usaha kecil menengah, koperasi, dan badan usaha milik desa dalam rantai pasokan MBG menunjukkan adanya aliran dana yang besar ke sektor ekonomi lokal. Semakin banyak bahan baku yang diambil dari daerah setempat, semakin banyak pula uang yang tetap berada di wilayah tersebut. Dana MBG yang mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pengeluaran besar oleh pemerintah bisa menjadi sarana untuk mendorong perekonomian, sehingga meningkatkan belanja rumah tangga dan produksi dalam negeri. (Mursalin et al., 2026)

Dalam pendekatan Keynesian, keberadaan MBG melalui SPPG dapat dianggap sebagai alat kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi masyarakat, sekaligus menciptakan pekerjaan, meningkatkan penghasilan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah, serta mempercepat sirkulasi uang di tingkat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program tidak hanya dinilai dari indikator kesehatan, tetapi juga dari bagaimana program tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi daerah. (Basit & Ramadani, 2025)

Pembahasan

Keberadaan SPPG memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Operasional SPPG membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan memasak, pengemasan, distribusi makanan, administrasi, kebersihan, dan pengawasan mutu. Kebutuhan tenaga kerja tersebut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Peningkatan kesempatan kerja berdampak pada bertambahnya pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang diperoleh pekerja SPPG digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima makanan bergizi, tetapi juga kepada keluarga pekerja yang terlibat dalam operasionalnya. (Basit & Ramadani, 2025)

Selain pertumbuhan pendapatan, adanya pekerjaan yang relatif dapat diandalkan untuk menciptakan rasa aman secara finansial bagi keluarga para pekerja. Stabilitas dalam pendapatan memungkinkan keluarga untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dibandingkan dengan hanya mengandalkan pekerjaan informal yang memiliki karakteristik yang tidak menentu. Dari perspektif sosial, partisipasi masyarakat dalam SPPG turut berkontribusi pada pengembangan keterampilan kerja. Pekerja mendapatkan pengalaman dalam hal pengelolaan makanan, manajemen operasional, dan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Dengan cara yang tidak langsung, Program MBG juga memberikan keuntungan bagi anak-anak dari para pekerja. Meningkatnya pendapatan keluarga memberikan peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas kehidupan generasi selanjutnya.

(Hanasi et al., 2026)

Kesimpulan

Program Makanan Sehat Tanpa Biaya melalui Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki fungsi krusial dalam meningkatkan daya beli para pekerja di tingkat bawah. Adanya SPPG membuka peluang kerja baru, menaikkan pendapatan keluarga, memperkuat kemampuan tenaga kerja, serta memberikan dukungan bagi kesejahteraan keluarga pekerja. MBG ini juga menawarkan kesempatan besar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dengan meningkatnya permintaan akan produk pertanian, peternakan, dan usaha kecil setempat. Akan tetapi, keberhasilan dalam pelaksanaan program ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menjaga kualitas makanan, kesinambungan pendanaan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. (Septiana et al., 2026)

Dalam pandangan ekonomi Keynesian, Program Makanan Bergizi merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah yang dapat memicu efek pengganda pada ekonomi. Dana yang disediakan pemerintah melalui SPPG kembali berputar dalam ekonomi lokal melalui belanja rumah tangga, kegiatan bisnis, dan transaksi di pasar setempat. Karenanya, Program Makanan Bergizi tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga dapat berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan pendorong peredaran uang di daerah. (Prasetyo et al., 2026)

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kepala desa, tokoh dan warga desa X di Kecamatan Y Kabupaten Sidoarjo atas kerjasama dan dukungan sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Ariyanto, K., & Saharuddin. (2026). Free nutritious meals program or Makan Bergizi Gratis (MBG) and the rural political economy: A theory-driven literature review of urban bias, spatial justice, and fiscal dynamics in

rural-urban relations. *Priviet Social Sciences Journal*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55942/pssj.v6i5.1803>

Aziizah, D. U., Widzayanto, L. A., Muarifudin, M., & Ripan. (2026). Optimalisasi Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Integrasi UMKM dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kendal. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 5, 240-254. <https://doi.org/https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.475>

Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>

Hanasi, R., Akuba, I., & Wahab, I. M. , et al. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6, 95-112. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6403>

Hanasi, R., Akuba, I., Wahab, I. M., Monoarfa, C., Ahmad, M. R. M., & Pantoiyo, A. P. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6, 95-112. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6403>

Mursalin, I. A. , dkk. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Ekonomi Lokal Inklusif di Provinsi Bengkulu. *Solusi*, 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slsi.v24i1.13399>

Prasetyo, D., Arianto, O. D., Firmannandya, A., & Putranto, T. D. (2026). School SPPG Coordination in Indonesia's Free Nutritious Meal Program (MBG): A Case Study in Bojonegoro, East Java. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 19-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2955>.

Riawan, D., Tanziha, I., & Ekayanti, I. , et al. (2026). Kajian Pemenuhan Gizi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). *Policy Brief Pertanian Kelautan Dan Biosains Tropika*, 8(1), 1555-1559. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0801.1555-1559>

Riyanto, K., & Saharuddin. (2026). Free nutritious meals program or Makan Bergizi Gratis (MBG) and the rural political economy: A theory-driven literature review of urban bias, spatial justice, and fiscal dynamics in rural-urban relations. *Priviet Social Sciences Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55942/pssj.v6i5.1803>

Septiana, A., Sunardi, D., Sidki, A., & Duryat, M. (2026). Dampak Multidimensional Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kualitas Pendidikan dan Ekonomi Lokal: Studi Literatur Jurnal. . *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.45136>